



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PAUD-HI DALAM AGENDA WAJIB BELAJAR 13 TAHUN

Yulia Indahri

Analisis Legislatif Ahli Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 18 Juni 2025, dalam Lokakarya Laporan Awal Pengembangan Strategi Lima *Pilar Early Childhood and Education Development (ECED) Council* di Jakarta, Ketua *ECED Council*, Fasli Jalal, menekankan pentingnya penguatan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif (PAUD-HI). Menurutnya, layanan PAUD tidak dapat dibatasi hanya pada aspek pendidikan, melainkan harus mencakup lima pilar utama: pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, dan pengasuhan. Strategi PAUD-HI ini ditujukan untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Sebagai langkah strategis memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini, pemerintah menetapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun prasekolah. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026, dengan proses perumusan strategis yang telah dimulai sejak akhir 2024. Meski demikian, implementasinya diperkirakan akan menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi struktural maupun kultural.

Kajian awal *ECED Council* mengidentifikasi adanya “polusi kebijakan” di antara sektor-sektor terkait seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan anak. Beragam regulasi dan program dari berbagai kementerian/lembaga belum terintegrasi secara efektif, serta cenderung kurang berorientasi pada capaian nyata (*outcome*) bagi anak. Koordinasi antarinstansi juga masih belum optimal dalam menjamin layanan PAUD yang utuh dan berkelanjutan di semua level pemerintahan.

Data Badan Pusat Statistik 2024 mengungkapkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan PAUD-HI. Sekitar 38,71 persen balita mengalami keluhan kesehatan, dan hanya 74,73 persen bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif. Sementara itu, Susenas Maret 2024 mencatat bahwa 27,32 persen anak usia dini pernah atau sedang mengikuti pendidikan prasekolah. Jenis layanan prasekolah yang paling populer adalah Taman Kanak-Kanak (TK)/Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA), dengan partisipasi mencapai 68,98 persen. Namun, tetap ada peluang, karena tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir satu tahun sebelum masuk SD menunjukkan angka cukup tinggi, yaitu 95,21 persen pada tahun 2024.

Tantangan lain adalah dalam bentuk “tsunami digital”. Pada tahun 2024, 39,71 persen anak usia dini tercatat telah menggunakan telepon genggam, dan 35,57 persen mengakses internet. Paparan gawai yang berlebihan berisiko menurunkan stimulasi intelektual dan emosional anak—fenomena yang dikenal sebagai *brain rot*. Kondisi ini memperkuat urgensi pendekatan PAUD yang menitikberatkan pada interaksi fisik, permainan tradisional, serta pola pengasuhan yang seimbang.

Direktorat PAUD Kemendikdasmen, bersama 74 mitra, telah mendukung kampanye wajib belajar prasekolah sebagai bagian dari budaya belajar keluarga. Namun, ekosistem PAUD-HI masih membutuhkan penguatan signifikan, termasuk dalam aspek regulasi, pendanaan

dan keterlibatan masyarakat. Alokasi anggaran PAUD yang hanya sekitar 0,95 persen dari total anggaran pendidikan menjadi catatan penting, jauh dari standar minimal yang direkomendasikan WHO sebesar 10 persen.

Di sisi lain, inisiatif masyarakat sipil seperti Rumah Anak Sigap dan Rumah Bersama Merah Putih menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang melibatkan orang tua, mahasiswa, dan pengasuh dapat memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang anak. Peran keluarga dan lingkungan sekitar menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini.

Secara global, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan satu tahun PAUD yang berkualitas sebelum masuk pendidikan dasar pada tahun 2030, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Incheon. Namun demikian, dengan angka partisipasi kasar (APK) PAUD yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga—misalnya Filipina yang telah mencapai 80,7 persen—Indonesia perlu mempercepat langkah melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan wajib belajar 13 tahun, khususnya dalam memastikan keterpaduan lintas sektor dalam layanan PAUD-HI. Melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat mendorong harmonisasi regulasi antarkementerian/lembaga yang selama ini berjalan parsial. Fungsi anggaran juga penting difokuskan untuk meningkatkan alokasi pembiayaan PAUD, termasuk penguatan layanan prasekolah satu tahun dan intervensi berbasis komunitas. DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk memanfaatkan rekomendasi dan kajian dari *Early Childhood and Education Development (ECED) Council* sebagai dasar pengambilan kebijakan, sekaligus mendorong penyusunan Rencana Aksi Nasional PAUD-HI pasca-2024 secara partisipatif, berbasis data, dan melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana layanan dasar anak usia dini.

Sumber

bps.go.id, 2024;

kompas.id, 25 Juni 2021, 21 November 2024, dan 18 Juni 2025;

pundi.or.id, 5 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*